



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Mangala Wanabakti, Blok 1 Lantai 1 Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telepon : 021-5705099, 5730118-9 Faximile 5710484

SIARAN PERS

Nomor: SP. 259 /HUMAS/PP/HMS.3/09/2017

Hotspot Terpantau Meningkat di Kalimantan Barat

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis, 21 September 2017.

Jumlah *hotspot* terpantau mulai meningkat, khususnya di Kalimantan Barat. Data satelit NOAA Rabu (20/9/2017) pukul 20.00 WIB, menunjukkan terpantau 39 titik *hotspot*, dengan rincian 24 titik di Kalimantan Barat, 7 titik di Bangka Belitung 7 titik, 3 titik di Jawa Barat, dan 1 titik masing-masing di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Hotspot di Kalimantan Barat juga terpantau cukup tinggi berdasarkan satelit TERRA AQUA (NASA) *confidence level* ≥ 80 , yaitu sebanyak 12 titik dari total 22 *hotspot* yang terpantau. Sedangkan dari total 62 *hotspot* yang terpantau satelit TERRA AQUA (LAPAN) *confidence level* $\geq 80\%$, 46 diantaranya berada di provinsi tersebut. Adapun penyebaran *hotspot* lainnya terdapat di Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan.

Meskipun demikian, menurut Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Raffles B. Pandjaitan, jumlah *hotspot* tahun 2017 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2016. "Berdasarkan data satelit NOAA sampai saat ini terpantau sejumlah 2.076 titik, dan menurun sebanyak 1.126 titik (35,16%), dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 3.202 titik. Sedangkan data TERRA AQUA (NASA) (*confidence level* $> 80\%$), menurun 1.967 titik (57,04%), dari semula 3.448 titik di tahun 2016, menjadi 1.481 titik", jelasnya.

Menanggapi peningkatan *hotspot* di Kalimantan Barat, Raffles berpendapat, hal ini dapat disebabkan aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan pada waktu bersamaan, meskipun terdapat batasan-batasan dalam pelaksanaannya.

"Di Kalimantan Barat masih menganut kearifan lokal dengan sebutan 7 (tujuh) T, yaitu Tebas, Tebang, Tunu, Tugal, Tanam, Tuai dan Tinggal," ujar Raffles.

Beberapa aturan kearifan lokal tersebut, antara lain diawali dengan acara adat, penyiapan sesajen, keharusan membuat sekat bakar (jika melanggar dan terjadi kebakaran, dikenakan sanksi adat), penggunaan Lemang (ketan dalam bambu) sebagai ukuran keberhasilan pembakaran, pembakaran dilakukan perorangan ataupun bersama kerabat, serta sebagian besar pembukaan lahan agar dilaksanakan di areal tanah mineral.

Raffles juga mengungkapkan, "Berdasarkan hasil temuan di lapangan, para masyarakat sudah mulai memilih metode pengolahan lahan dengan bantuan traktor dan teknologi pertanian lainnya".

Sementara itu, berdasarkan Prediksi Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) tanggal 21 September 2017, pada umumnya provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, berada dalam kondisi sangat mudah terbakar.

"Informasi prediksi SPBK ini harus menjadi perhatian agar dapat diantisipasi adanya potensi karhutla terutama di daerah-daerah tersebut", tegas Raffles.

Pada lokasi lainnya, pemadaman kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dilakukan Manggala Agni Daops Banyuasin. Kebakaran ini terjadi pada dua lokasi, yaitu di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, seluas \pm 5 Ha, dan di Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, seluas \pm 4 Ha.

Begitu pula halnya di Kalimantan Tengah, Manggala Agni Daops Palangka Raya berhasil memadamkan kebakaran pada lahan gambut seluas \pm 1,5 Ha di Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya. Di Kalimantan Selatan, Manggala Agni Daops Tanah Bumbu melakukan pemadaman di Desa Sardangan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu pada lahan seluas \pm 40 Ha. (*)

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi – 081375633330